

## MENYIMAK PEMBANGUNAN POLITIK DI INDONESIA

Oleh : Sugeng Astanto \*)

Berbicara masalah politik, biasanya akan bermuara dari konsep dasar, bahwa manusia adalah makhluk politik (zoon polition). Dengan demikian politik merupakan suatu aspek yang dibangun pada kepribadian setiap individu. Menurut Spranger, manusia sebagai makhluk politik memiliki kecenderungan menjunjung tinggi nilai-nilai politik. Nilai-nilai politik menjadi prioritas preferensi perilakunya (Maddi, 1976). Lebih jauh ditegaskan bahwa individu yang mengutamakan nilai-nilai politik cenderung memiliki motivasi untuk berkuasa yang tinggi. Dalam pandangan psikologi, motivasi berkuasa sering dibahas dalam istilah "need of power" (McClelland, 1987). Perilaku sok berkuasa adalah contoh sederhana bahwa manusia adalah makhluk politik yang di dalamnya memiliki "need of power". Misalnya seseorang yang menempati tanah negara, ketika hendak digusur ia malah menentang mempertahankan haknya? (padahal jelas bahwa ia tak punya hak atas tanah itu), bahkan ia berani mengajukan tuntutan ganti rugi. Apa yang ia lakukan mencerminkan adanya nilai-nilai politik yang menjadi "frame of reference", sehingga ia punya langkah yang politis dalam menyelesaikan masalah.

Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa manusia tak pernah lepas dari dimensi politik yang pada gilirannya memerankan kekuasaan. Manusia ingin selalu memiliki kekuasaan dan pengaruh.

Oleh karenanya setiap individu selalu memiliki kepentingan politik. Kepentingan itu tercermin dalam menentukan nasibnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian mereka merasa eksistensinya diakui dan sekaligus sebagai upaya meningkatkan aktualisasi dirinya. Oleh sebab itu benturan kepentingan politik antar individu, antar kepentingan kelompok merupakan fenomena yang wajar dan hampir selalu mewarnai peradaban bangsa dan kurun waktu yang panjang. Benturan-benturan kepentingan politik itu semakin nyata, ketika kepentingan politik yang dijadikan acuan perilaku individu dihadapkan pada kepentingan politik dan segala pranata politik yang berlaku di masyarakat tempat individu itu berada. Dalam mewujudkan kepentingan

\*) Staf Pengajar IISIP Jakarta

politiknya individu dihadapkan pada "bargaining position" dengan kekuatan politik dan sosial yang ada dalam masyarakat itu. Persoalan yang sering muncul adalah seberapa jauh masing-masing pihak saling mengakomodasi kepentingan politik dan potensi politik yang mereka miliki? Untuk mengatasi persoalan tersebut maka setiap bangsa memiliki caranya sendiri yang khas sesuai dengan norma politik yang diyakini serta kondisi riil yang dihadapi oleh suatu bangsa. Dalam rangka menjamin terwujudnya kepentingan politik setiap individu, masyarakat dan bangsa, maka setiap bangsa membangun sistem politik yang sesuai dengan kondisi dan cita-cita masing-masing bangsa.

### **Pembangunan politik**

Politik adalah suatu proses hidup yang serba hadir dalam tiap lingkungan sosial budaya (Yuwono, 1980). Dalam pengertian ini terkandung makna bahwa pada prinsipnya tak seorangpun mampu melepaskan diri dari kehidupan politik. Bahkan ketika pejabat menganjurkan pada masyarakat untuk tidak terlibat pada "permainan politik", semua orang mestinya juga sadar bahwa anjuran itu adalah juga politis yang sarat dengan kepentingan politik. Tak jarang mereka menghimbau agar orang berpolitik secara bertanggung jawab, rasional, mementingkan keselamatan bangsa dan sejenisnya. berangkat dari prinsip ini bisa disimpulkan bahwa kita memerlukan pranata politik yang mapan. Atau dengan kata lain bisa ditegaskan bahwa pembangunan politik mutlak perlu. Namun demikian sejarah telah membuktikan bahwa tidak semua orang bisa melihat pembangunan politik penting artinya. Pemikiran tentang perlu tidaknya pembangunan politik telah menimbulkan perdebatan klasik yang tak pernah surut. Pihak yang menolak pembangunan politik tersebut tidak perlu. Yang diperlukan bagi kelangsungan dan kesejahteraan bangsa adalah pembangunan ekonomi. Kaum Marxis dan Neo Marxis berkeyakinan bahwa struktur ekonomi menentukan supra struktur politik. Kaum Liberalis juga berasumsi bahwa pertumbuhan ekonomi akan mendatangkan pemekaran demokrasi politik (Goodwin, 1987). Tesis kedua kelompok ini gugur karena realitasnya menunjukkan bahwa sistem perekonomian yang tumbuh pesat seringkali tidak diikuti dengan kemajuan kehidupan politik yang lebih baik. Bahkan kemajuan ekonomi mengakibatkan menurunnya kualitas kehidupan politik. Pengelompokan kekuatan ekonomi cenderung untuk menciptakan kekuatan dan intitusi politik yang berorientasi mempertahankan status quo. Negara berkembang umumnya mengidap penyakit ini. Kehidupan politik dikendalikan oleh kolaborasi antara kepentingan politik elit penguasa, pengusaha dan elit Angkatan Bersenjata (Herrison, 1988). Disamping itu juga ada yang berpendapat pembangunan politik perlu sebagai langkah pelembagaan dalam rangka

pembangunan ekonomi. Asumsi mereka adalah, bahwa pembangunan politik diperlukan dalam rangka menciptakan kerangka landasan dan struktur bagi kemajuan pembangunan ekonomi.

Kelompok yang lain berpendapat bahwa pembangunan politik mutlak perlu. Esensi pembangunan politik pada dasarnya adalah upaya menuju "nation and character building" (proses pembinaan dan pembangunan watak bangsa). Dalam konteks inilah manusia sebagai makhluk politik berpendapat media untuk berekspresi mengaktualisasikan dirinya secara optimal. Untuk itu diperlukan pranata, perangkat politik yang mampu menampung potensi, aspirasi, harapan dan cita-cita politik masyarakat. Setiap bangsa mempunyai cara yang khas dalam mewujudkan wahana tersebut. Pembangunan politik dalam konteks ini juga mempunyai makna yang lebih luas dan urgen dari sekedar kepentingan ekonomi. Berusaha mensosialisasi nilai-nilai, filsafat dan pandangan hidup bangsa melalui supra struktur dan infra struktur politik merupakan tugas berat yang harus diselesaikan dalam pembangunan politik setia bangsa. Keberhasilan dalam membina kehidupan politik dan warga negara yang handal dalam berbagai dimensi kehidupan.

### **Perspektif di Indonesia**

Indonesia meletakkan struktur pembangunan politik di atas landasan Pancasila dan UUD '45. Maka yang muncul kemudian adalah formulasi "sistem politik Demokrasi Pancasila" yang berarti bahwa politik kehidupan politik didasarkan pada Pancasila sebagai satu-satunya azas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Lemhannas, 19889). Salah satu ciri yang menonjol dalam sistem politik ini adalah adanya "concern" yang tinggi terhadap kepentingan dan integritas individu (baca : rakyat). Hal ini terbukti dengan adanya azas kedaulatan di tangan rakyat. Individu sebagai makhluk politik mendapatkan medianya untuk mengatikusasikan kepentingan-kepentingannya, dalam batas sesuai dengan tujuan dan komitmen bangsa.

Pembangunan politik dalam konteks nation and character building di Indonesia juga tidak terlepas dari perdebatan klasik seperti tersebut di atas. Pada tahap awal kepemimpinan orde baru pelaksanaan pembangunan berorientasi pada pembangunan ekonomi. Konsep dasar yang dijadikan acuan adalah suatu asumsi, bahwa keadilan, kesejahteraan dan sejenisnya akan muncul dengan sendirinya apabila perekonomian tumbuh dengan pesat (trickle down effect theory). Asumsi ini menimbulkan perbedaan yakni antar kalangan mahasiswa UI dengan para teknokrat, yang pada gilirannya melahirkan peristiwa "Malari".

Kenyataan sampai saat ini dari apa yang diperjuangkan mahasiswa tersebut terbukti. Pemerataan masih merupakan barang langka dan ini melemahkan daya tangkal bangsa (L.B. Moerdany, 1991). Keadilan juga masih merupakan barang mewah yang hanya bisa dimiliki oleh golongan tertentu. Kasus penggusuran tanah dan ganti rugi adalah bukti konkrit.

Namun demikian bukan berarti orde baru tidak berhasil mencapai perbaikan politik. Banyak keberhasilan yang sudah dicapai dalam pembangunan politik. Misalnya dengan adanya penyusutan parpol, yaitu dalam pemilu 1971 jumlah parpol tinggal 10 yang semula 27 parpol. Kemudian pada tahun 1973 dirampingkan menjadi 3 partai. Bersamaan dengan itu dirumuskan pula kebijakan politik massa mengambang (floating mass). Hal ini ternyata untuk mengeliminir semangat primordialisme, fanatisme pendukung partai. Sejalan dengan itu dilakukan pendidikan politik yang dicanangkan lewat P-4, dilaksanakan pada berbagai lapisan masyarakat melalui dari tingkat RT/RW sampai tingkat pusat. Kondisi stabilitas poliitik semakin mantap dengan dirumuskannya pancasila sebagai satu-satunya azas.

Meskipun ada yang dikatakan kurang berhasil dalam pembangunan politik di Indonesia, sebenarnya hanya persoalan "kebebasan berpendapat". Salah satu indikator yang bisa dilihat adalah dilakukannya pembreidelan beberapa surat kabar beberapa waktu yang lalu. Melalui SIUPP, kebebasan dan kemandirian pers benar-benar "terkendali".

Akibat keberadaan pers hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah dan kurang mampu menyuarakan kepentingan rakyat. Hal ini memang diakui oleh Fraksi Karya Pembangunan yang mengharapkan pers selaku mitra kerja dapat lebih memahami kedudukan dan peran FKP sebagai bagian tak terpisahkan dari DPR-RI (Suara Pembaruan, 22 Juli 1993).

Lebih lanjut ditegaskan bahwa pihaknya selalu mendorong anggotanya untuk menyuarakan kepentingan rakyat kecil melalui media massa cetak maupun elektronik. Karena melalui pers-lah semua masalah terungkap kepermukaan dan semua masyarakat luas dapat mengetahui perjuangan DPR terhadap kepentingan rakyat kecil.

Terlepas dari berhasil tidaknya pembangunan politik Indonesia, maka untuk mengantisipasi tantangan baru dalam kancah politik di masa yang akan datang, perlu dipertimbangkan masalah restrukturisasi politik yang mengarah pada penataan kembali fungsi dan peran lembaga-lembaga politik. Disamping itu perlu diupayakan dengan sungguh-sungguh mewujudkan keterbukaan dalam berbagai dimensi kehidupan politik dan menumbuhkan budaya politik yang lebih matang atau dewasa, sehingga dapat dihindarkan "prejudice" serta agresifitas verbal.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Goodwin, 1987, Using Political Ideas, Singapore, John Wiley & Sons.**
- Harrison, 1988, The Sociology of Modernization and Development, London, Uwin Hyman.**
- Maddi, 1976, Personality Theories A Comparative Analysis, Illinois, Dorsey Press.**
- McClelland, M.C., 1987, Human Motivation, Sydney, Cambridge University Press.**
- Yuwono, 1982, Politik dan Pembangunan, Jakarta, CV. Rajawali.**
- Suara Pembaruan, 22 Juli 1993.**